



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2013**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DP Korpri Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan mengevaluasi secara berkala penyusunan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan bidang tugas dan SKPD/UKPD yang dikoordinasikan, serta mensinergikannya dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD).

KEDUA : Inspektur/Para Kepala Badan/Para Kepala Dinas/Para Direktur RSUD/Direktur RSKD/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Para Kepala Biro/Sekretaris DPRD, Sekretaris DP Korpri melaksanakan :

- a. penyusunan LPPD SKPD Tahun 2013 sesuai dengan sistematika dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Gubernur ini, dengan mengakomodir laporan dari UKPD/UPT yang berada dibawahnya;

2

- b. pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana format dalam Lampiran II Instruksi Gubernur ini;
- c. pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana format dalam Lampiran III Instruksi Gubernur ini;
- d. pengisian data sesuai dengan bidang tugas pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Aspek Tingkat Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana format dalam Lampiran IV Instruksi Gubernur ini;
- e. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diktum KEDUA kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana di Gedung Teknis Abdul Muis Lantai 8, Jalan Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat, Telepon/Fax 021-3865689, paling lambat Minggu Kedua Februari 2014 dalam bentuk hard copy dan soft copy;
- f. penyampaian data seorang pejabat yang ditunjuk sebagai penghubung (Liasion Officer /LO), yang menguasai informasi dan permasalahan pada SKPD masing-masing, dengan biodata sebagaimana tercantum pada Lampiran V Instruksi Gubernur ini, paling lambat minggu Ketiga bulan Januari 2014; dan
- g. penyampaian data/informasi dan dokumen yang dibutuhkan terkait dengan LPPD kepada Tim Monitoring dan Evaluasi LPPD 2013 Provinsi DKI Jakarta serta kooperatif kepada Tim Teknis Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2013 yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2014.

- KETIGA : Para Walikota dan Bupati merekap laporan/data dari Kecamatan dan memasukkannya ke dalam LPPD Kota/Kabupaten Tahun 2013, serta menyampaikan LPPD Kota/Kabupaten kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana selambat-lambatnya Minggu Kedua Februari 2014 dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- KEEMPAT : Para Camat merekap laporan/data dari Kelurahan dan memasukkannya ke dalam LPPD Kecamatan Tahun 2013, serta menyampaikan LPPD Kecamatan kepada Walikota/Bupati paling lambat akhir bulan Januari 2014 dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- KELIMA : Para Lurah menyampaikan LPPD Kelurahan kepada Camat paling lambat Minggu Keempat Januari 2014 dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- KEENAM : Biro Organisasi dan Tatalaksana menyelesaikan penyusunan LPPD Provinsi paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2014, dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Maret 2014 serta melaksanakan monitoring dan evaluasi LPPD 2013 dan menerima Tim Teknis Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2014 pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2014


W

KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD/UKPD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

2 Plt. Sekretaris Daerah, 



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 16 TAHUN 2014

Tanggal 20 Februari 2014

SISTIMATIKA LPPD SKPD

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi
2. Ruang lingkup sasaran

Diisi data-data obyek (sasaran) tugas SKPD. Contoh Dinas Pendidikan a.l menerangkan jumlah siswa, jumlah guru, jumlah dan kualitas bangunan sekolah; Dinas PU a.l menerangkan jumlah dan kualitas jalan (ruas, panjang dan luas jalan berdasarkan kelasnya); dalam bentuk tabel.

Catatan :

Khusus untuk Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi memasukan uraian tentang :

- a. Data geografi (luas, batas wilayah; jumlah Kecamatan, Kelurahan, RT, RW),
- b. Data demografi a.l :
 - jumlah penduduk per kelompok umur (L/P);
 - jumlah rumah tangga (per Kecamatan);
 - jumlah rumah (per Kecamatan);
 - jumlah rumah bersanitasi baik (per Kecamatan);
 - jumlah rumah pengguna air bersih (per Kecamatan);
 - tingkat kemiskinan (per Kecamatan),
- c. Data Kewilayahan lainnya.

B. Kelembagaan SKPD

Diisi nama dan bentuk kelembagaan serta pejabat pada SKPD, UKPD serta UPT yang ada di bawah SKPD yang bersangkutan.

BAB II VISI, MISI, RENCANA STRATEGIS DAN PROGRAM PRIORITAS

A. Visi Misi SKPD

Diisi visi dan misi SKPD dalam mendukung Visi dan Misi Daerah

B. Rencana Strategis

Diisi nomor dan tanggal penetapan Renstra SKPD, dan pokok-pokok Renstra dalam mewujudkan visi dan misi SKPD.

C. Program Prioritas SKPD

Diisi program prioritas SKPD, terutama yang berkaitan dengan program prioritas daerah. Bila SKPD melaksanakan lebih dari 1 (satu) urusan, agar penulisannya dipisah. Contoh

1. Program Prioritas Urusan
 - a.
 - b.
2. Program Prioritas Urusan
 - a.
 - b.

2

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

1. Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib (Kalau Ada)

No	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)			Total Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9 (8/7)
	Jumlah							

2. Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Pilihan (Kalau Ada)

No	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)			Total Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9 (8/7)
	Jumlah							

Catatan

1. Dalam hal ini SKPD dianggap melaksanakan urusan pokok sesuai dengan kewenangan (urusan), tupoksi dan kelembagaannya. Satu SKPD dapat melaksanakan lebih dari satu urusan.
2. Yang dimaksud Urusan Wajib adalah :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Lingkungan Hidup
 - d. Pekerjaan Umum
 - e. Penataan Ruang
 - f. Perencanaan Pembangunan
 - g. Perumahan
 - h. Kepemudaan dan Olahraga
 - i. Penanaman Modal
 - j. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - l. Ketenagakerjaan
 - m. Ketahanan Pangan
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat
 - p. Perhubungan
 - q. Komunikasi dan Informatika
 - r. Pertanahan
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - t. Otonomi Daerah, Pm, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- v. Sosial
- w. Kebudayaan
- x. Statistik
- y. Perpustakaan
- z. Kearsipan

3. Yang dimaksud Urusan Pilihan adalah

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Pertanian
- c. Kehutanan
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral
- e. Pariwisata
- f. Perindustrian
- g. Perdagangan
- h. Ketransmigrasian

B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Prioritas Urusan

Tulis program prioritas SKPD sesuai dengan urusan yang dilaksanakan. Indikator program prioritas antara lain : Dedicated Program, menunjang Program Nasional, berkaitan langsung dengan pencapaian IKU RPJMD dan lain-lain

2. Program dan Kegiatan Urusan

- a. Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah

Contoh : Tabel Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah Urusan

No	Program Nasional	Program Daerah
Jumlah		

Catatan :

Program Nasional Tahun 2013 tidak diberikan data dari Kemendagri, sehingga pada kolom Program Nasional tidak perlu di isi.

- b. Jumlah dan Realisasi Kegiatan Tahun 2013

Contoh : Tabel Realisasi Program dan Kegiatan Urusan

No	Nama Program	Jml. Kegiatan	Realisasi Kegiatan	%
1	2	3	4	5 (4/3)
	Jumlah			

n

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minim

a. Pencapaian SPM

Cantumkan daftar SPM dan pencapaiannya sesuai dengan urusan yang dilaksanakan selama periode RPJMD (2013-2017)

Bila belum ada SPM gunakan IKU SKPD, atau bila dimungkinkan SPM dan IKU ditulis kedua-duanya. Dalam hal ini SPM bisa juga dijadikan IKU. Bila SKPD belum memiliki SPM dan IKU, cantumkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahunan yang merupakan program atau kegiatan unggulan yang mencakup target dan realisasi yang terukur

Contoh : Tabel Capaian SPM/IKU Urusan

No	Uraian SPM/IKU/Tapkin	Target 2013-2017		Capaian Tahun				
		Volume	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017

b. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV instruksi ini diuraikan pada bagian ini.

IKK sedapat mungkin menggambarkan data selama masa RPJMD atau minimal 2 tahun terakhir.

4. SDM Pelaksana Urusan

Menerangkan jumlah kualitas dan klasifikasi seluruh pegawai pada SKPD dan UKPD dalam satu SKPD.

a. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel : Rekapitulasi Klasifikasi Pegawai Dinas/Badan

No	Klasifikasi	Dinas	Suku Dinas						Jumlah
			JP	JU	JT	JS	JB	KS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3 s.d 9)
A.	Golongan (Jumlah)								
	• Golongan IV								
	• Golongan I								
	• Golongan I								
	• Golongan I								
B.	Eselon (Jumlah)								
	• Eselon I								
	• Eselon II								
	• Eselon III								
	• Eselon IV								
	• Eselon V								
	• Fungsional								
	• Staf								

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3 s.d 9)
C.	Pendidikan (Jumlah)								
	• S3								
	• S2								
	• S1								
	• Diploma								
	• SLTA								
	• SLTP								
	• SD								

Catatan :

Kolom 3 sampai dengan 9 disesuaikan dengan kelembagaan yang ada pada SKPD masing-masing.

b. Kesesuaian Jabatan dengan Pendidikan, Pangkat dan Diklatpim

Tabel : Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural pada Dinas/Badan.....

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang Terisi	Jumlah Pejabat Yang Memenuhi Persyaratan		
				Pendidikan	Pangkat	Diklatpim
1.	Eselon I					
2.	Eselon II					
3.	Eselon III					
4.	Eselon IV					
5.	Eselon V					
	Jumlah					

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Merupakan akumulasi data dari SKPD, UKPD dan UPT dari SKPD yang bersangkutan.

Tabel : Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Anggaran Urusan Pendidikan			
1. Belanja Tidak Langsung			
2. Belanja Langsung			
a. Belanja Pegawai			
b. Belanja Barang dan Jasa			
c. Belanja Pemeliharaan			
d. Belanja Modal			
Catatan Perbandingan :			
• Alokasi Anggaran Urusan : APBD			
• Belanja Modal : Belanja Urusan			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang dan Jasa			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Urusan			

W

6. Sarana dan Prasarana

a. Prasarana berupa tanah (bila ada)

Diuraikan jumlah seluruh bidang tanah yang dikuasai (aset) SKPD dan jumlah bidang tanah yang telah dimanfaatkan (bila mungkin dengan luasnya)

b. Prasarana utama pendukung tupoksi

Contoh : Dinas Pendidikan menyajikan data jumlah sekolah, jumlah gedung sekolah, jumlah laboratorium sekolah, dll; Dinas Olah Raga dan Pemuda menyajikan data jenis dan jumlah fasilitas olah raga, dan seterusnya

c. Fasilitas/Prasarana Informasi

Contoh Tabel : Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Dinas/ Badan.....

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Dinas	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman									
2.	Kota Pengaduan									
3.	Media Massa									
4.	E-mail									

Catatan :

- Website :
- E-mail :

d. Prasarana dan sarana lain yang patut dilaporkan

7. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Proses perencanaan SKPD sesuaikan dengan tupoksi baik merupakan top down yaitu menjabarkan kebijakan pusat (RPJP, RPJMD/RKPD dan RKT atau Renja SKPD) maupun bottom up, seperti usulan perbaikan sarana, prasarana dan lain-lain.

Contoh Tabel : Sinkronisasi perencanaan program urusan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2013	10	RENJA SKPD: RKPD	100
2	RENJA SKPD 2013	10	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2013	10	DPA : RKA	100
4	DPA 2013	10		

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi serta solusi pemecahannya.

Contoh : Beberapa masalah dalam penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta antara lain :

- a. Saat ini dibutuhkan banyak pegawai sebagai penjaga sekolah, guru olahraga dan guru lainnya.
- b. Terdapat 233 SDN dan 39 SMPN yang berada di daerah rawan banjir.

N

- c. Masih banyak fasilitas gedung yang perlu direhabilitasi seperti ruang perpustakaan, laboratorium, ruang UKS, serta rumah dinas Kepsek/guru/penjaga sekolah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap menambah SDM aparatur dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Kekurangan penjaga sekolah antara lain diatasi dengan petugas harian lepas (Phl) yang dibiayai oleh sekolah yang bersangkutan. Sedangkan penambahan tenaga guru dilakukan sesuai dengan formasi dan prioritas rekrutmen pegawai, perbaikan gedung dan prasarana sekolah lainnya dilakukan dengan rehabilitasi ringan sampai rehabilitasi berat/total.

9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
 - a. Daftar dasar hukum pelaksanaan tugas yang bersifat spesifik sesuai dengan urusan yang dilaksanakan, baik dalam bentuk Perda, Pergub, atau Keputusan Kepala SKPD (contoh tentang pedoman, juklak, juknis, SOP dll)
 - b. Hal-hal yang bersifat inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat atau pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang bersifat SDM, Prosedur, Teknologi Informasi, dll.
 - c. Prestasi Nasional dan Internasional yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan (disesuaikan dengan urusan yang menjadi tupoksi)

Diuraikan persis sama dengan Sub B tetapi tidak ada SPM.
- D. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Sesuaikan dengan tupoksi/ kegiatan)

Yang harus dijelaskan dalam Sub Bab ini adalah :

 1. Mitra Yang Diajak Kerja Sama
 2. Dasar Hukum
 3. Bidang Kerja Sama dan Nama Kegiatan
 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 5. Jangka Waktu Kerja Sama
 6. Hasil (Output) dari Kerja Sama
 7. Permasalahan dan Solusi
 8. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
- E. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah (Sesuaikan dengan tupoksi/ kegiatan)
 1. Forum Koordinasi
 2. Materi Koordinasi
 3. Instansi Vertikal Yang Terlibat
 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 5. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan
 6. Hasil dan Manfaat Koordinasi
 7. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
 8. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
- F. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Sesuaikan dengan tupoksi/kegiatan)
 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 2. Status Bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Daerah Dalam menghadapi Kemungkinan Bencana
 5. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana
 6. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berisi rangkuman evaluasi dan kajian/analisis secara menyeluruh tentang materi laporan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab V yang berupa pernyataan-pernyataan, misalnya :


- Program ini (disebutkan) berjalan lancar dan berhasil sesuai dengan rencana, atau pelaksanaan kegiatan ini (sebutkan) tidak mencapai target yang ditentukan, karena sebab-sebab tertentu (sebutkan sebab-sebabnya)
- Hambatan yang menonjol adalah penyebab kurang lancarnya pelaksanaan pekerjaan seperti kurangnya koordinasi antara instansi terkait atau terlalu sempitnya waktu pelaksanaan dan sebagainya.

B. Saran

Berisi gagasan atau pemikiran untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah dalam pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Saran juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan, misalnya :

- Sebelum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan ganti rugi kepada yang berhak sebagai akibat tanahnya digunakan untuk kepentingan pembangunan waduk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka disarankan agar dilakukan penelitian lebih dahulu untuk memperoleh kepastian kepemilikan tanah dan status tanahnya.

a.n. Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

R Plt. Sekretaris Daerah, 



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Lampiran II : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 16 TAHUN 2014

Tanggal 20 Februari 2014

IKK TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB
DAN URUSAN PILIHAN TAHUN 2013

No.	Uraian IKK	Keterangan
1	Perda IMB	
2	Perda tentang kependudukan	
3	Rasio personil PNS SATPOL PP terhadap jumlah penduduk	
4	Waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Tahun 2007	
5	Waktu penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	
6	Jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	
7	Kerjasama dengan daerah lain	
8	Kesesuaian prioritas pembangunan	
9	Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%	
10	Waktu penetapan Perda APBD 2013	
11	Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	
12	Belanja untuk pelayanan dasar	
13	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	
14	Keberadaan Perda tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> ¹ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
15	Ratio PNS terhadap penduduk	
16	Sistem Informasi Kepegawaian	
17	Penataan SKPD	
18	Perda yang ditetapkan	
19	Raperda yang disetujui DPRD tahun 2013	
20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	
21	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	
22	Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	
23	Jumlah Perda yang dibatalkan	
24	Keberadaan Perda atau Pergub tentang konsultasi publik	

¹ Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND.

No.	Uraian IKK	Keterangan
25	Adanya media informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	
26	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	
27	Belanja Publik terhadap DAU	
28	Belanja Langsung terhadap total APBD	
29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)	
30	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	
31	Rasio SILPA terhadap total pendapatan	
32	Rasio realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan	
33	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja	
34	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	
35	Rasio realisasi PAD 2013 terhadap <u>potensi PAD</u> ²	
36	Peningkatan PAD	
37	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2013.	
38	Keberadaan E-procurement	
39	Jumlah persetujuan investasi	

a.n. Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Plt. Sekretaris Daerah, *N*



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

² Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD

Lampiran III : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 16 TAHUN 2014
Tanggal 20 Februari 2014

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM TAHUN 2013

No.	Uraian IKK	Keterangan
1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	
3	Jumlah Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	
4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	
6	Rasio PNS Provinsi	
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	
9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD <ul style="list-style-type: none">- Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA-SKPD	
10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	
11	Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	
12	Jumlah Program Renja SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	
13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	
14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	
15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	
18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	
19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	
20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : <ul style="list-style-type: none">- Papan Pengumuman- Pos Pengaduan- Leaflet- Mobil keliling- Pengumuman di Mass Media	
21	Keberadaan Survei Kepuasan Masyarakat	

a.n. Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Plt. Sekretaris Daerah,

Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Lampiran IV : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 16 TAHUN 2014
Tanggal 20 Februari 2014

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN TAHUN 2013

No	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan	Keterangan
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI 2. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/M 3. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS 4. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS 5. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA 6. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA /SMK/MA 7. Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi 8. Jumlah Guru jenjang SD/MI 9. Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi 10. Jumlah Guru jenjang SMP/MTS 11. Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah Memenuhi kualifikasi dan Kompetensi 12. Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA 13. Peta penjaminan mutu pendidikan 	
2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 2. Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 3. Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 4. Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yang sama 5. <u>Jumlah Desa/Kelurahan UCI</u> 6. Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan 7. Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. di saat wil. kerja pada kurun waktu tertentu 8. Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama 9. Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. kerja selama 1 tahun 10. Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama 11. Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. kerja selama 1 tahun 12. Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 	

No	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan	Keterangan
		13. Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 14. Jumlah seluruh miskin 15. Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 16. Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	
3	Lingkungan Hidup	1. Jumlah Kabupaten dan kota yg dipantau mutu udara ambient di kawasan pemukiman atau industri 2. Jumlah perusahaan wajib AMDAL yg telah diawasi 3. Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL 4. Jumlah daya tampung TPS (m3) 5. Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda dari jumlah kasus yang ada	
4	Pekerjaan Umum	1. Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik 2. Panjang seluruh jalan Provinsi 3. Jumlah rumah tangga bersanitasi 4. Jumlah total rumah tangga 5. Jumlah Rukun Warga (RW) kumuh 6. Jumlah Rukun Warga (RW)	
5	Tata Ruang	1. Luas ruang terbuka hijau 2. Luas wilayah ber HPL/HGB	
6	Perencanaan Pembangunan	1. Perda RPJPD 2. Perda RPJMD 3. Pergub RKPD 4. Jumlah program RKPD tahun 2013 5. Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2013	
7	Perumahan	1. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 2. Jumlah seluruh rumah tangga 3. Jumlah rumah layak huni 4. Jumlah seluruh rumah	
8	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (milik pemerintah) 2. Jumlah Lapangan olahraga milik Pemda 3. Jumlah Penduduk tahun 2013	
9	Penanaman Modal	1. Nilai Realisasi PMDN 2012 (miliar rupiah) 2. Nilai Realisasi PMDN 2013 (miliar rupiah) 3. Jumlah Proyek PMDN 4. Nilai Realisasi PMA 2012 (miliar rupiah) 5. Nilai Realisasi PMA 2013 (miliar rupiah) 6. Jumlah Proyek PMA	
10	Koperasi & UKM	1. Jumlah Koperasi Aktif 2. Jumlah Koperasi 3. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 4. Jumlah seluruh UKM	

No	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan	Keterangan
11	Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Ketersediaan database kependudukan 2. Perda tentang Kependudukan	
12	Ketenagakerjaan	1. Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) 2. Jumlah penduduk angkatan kerja 3. Jumlah pencari kerja yang mendaftar 4. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	
13	Ketahanan Pangan	1. Dokumen regulasi ketahanan pangan 2. Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama	
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah pekerja perempuan 2. Pekerja perempuan di lembaga Pemerintah 3. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 4. Jumlah angkatan kerja perempuan	
15	KB & KS	1. Jumlah pasangan usia subur 2. Jumlah peserta program KB aktif 3. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 4. Jumlah Keluarga	
16	Perhubungan	1. Jumlah angkutan darat 2. Jumlah penumpang angkutan darat 3. Jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya atau penggunaannya	
17	Komunikasi dan Informatika	1. Website milik Pemerintah Daerah 2. Jumlah dan Jenis Pameran/expo	
18	Pertanahan	1. Jumlah seluruh bidang tanah dan luasnya 2. Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat dan luasnya	
19	Kesbang dan Politik	1. Jumlah Partai Politik 2. Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah 3. Jumlah LSM, Ormas dan OKP 4. Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	
20	Otonomi Daerah	1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi 2. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan 3. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan 4. Tanggal dan Nomor Perda Penetapan APBD 5. Tanggal dan Nomor Surat Penyampaian Lapkeu dan Laporan Kinerja berdasarkan PP Nomor 8/2006 6. Tanggal dan nomor surat penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 7. Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 8. Jumlah APBD tahun yang bersangkutan 9. Realisasi pencapaian PAD	

No	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan	Keterangan
		10. Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 11. Daftar MoU kerjasama dengan daerah lain sampai tahun 2013	
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Jumlah anggota PKK 2. Jumlah anggota PKK aktif 3. Jumlah anggaran PPMK yang sudah diberikan berdasarkan kelompoknya 4. Jumlah Pemanfaat Dana PPMK 5. Perkembangan dan Bina Ekonomi PPMK	
22	Sosial	1. Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan lain-lain yang terdapat di suatu daerah 2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial 3. Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	
23	Budaya	1. Jumlah dan jenis penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. Jumlah dan jenis sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Jumlah sanggar kesenian 4. Jumlah bangunan/benda cagar budaya	
24.	Statistik	1. Buku "Provinsi Dalam Angka" 2. Buku "PDRB Provinsi"	
25.	Kearsipan	1. Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku 2. Jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola Kearsipan 2012 3. Jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola Kearsipan 2013 4. Jumlah Pejabat Fungsional Kearsipan	
26.	Perpustakaan	1. Jumlah koleksi judul buku minimal 2 tahun terakhir 2. Jumlah koleksi buku minimal 2 tahun terakhir 3. Jumlah pengunjung ke perpustakaan setiap tahun minimal 3 tahun terakhir 4. Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	
27.	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah produksi perikanan setiap tahun minimal 2 tahun terakhir 2. Nilai ekspor hasil perikanan per tahun minimal 2 tahun terakhir 3. Target ekspor hasil perikanan per tahun (tahun 2013) 4. Jumlah konsumsi ikan (ton) minimal 2 tahun terakhir 5. Target konsumsi ikan (ton) minimal 2 tahun terakhir	
28.	Pertanian	1. Produksi tanaman padi (ton) tahun 2013 2. Luas areal tanaman padi (ha) tahun 2013 3. Jumlah Kontribusi PDRB sektor pertanian (Rp miliar) tahun 2013 4. Jumlah total PDRB tahun 2013	

No	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan	Keterangan
29.	Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2013 2. Luas total hutan dan lahan kritis tahun 2013 3. Luas Kerusakan Kawasan Hutan (ha) tahun 2013 4. Luas Kawasan Hutan (ha) tahun 2013 	
30.	Energi dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas Penambangan Liar yang ditertibkan tahun 2013 2. Luas area penambangan yang liar tahun 2013 3. Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan tahun 2013 4. Jumlah total PDRB 	
31.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kunjungan wisata minimal 2 tahun terakhir 2. Jumlah industri pariwisata minimal 2 tahun terakhir 3. PAD sektor pariwisata minimal 2 tahun terakhir 4. Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata (Rp triliun) tahun 2013 5. Jumlah total PDRB (Rp Triliun) tahun 2013 	
32.	Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri (Rp Triliun) tahun 2013 2. Jumlah Industri minimal 2 tahun terakhir 	
33.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jml Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan tahun 2013 2. Nilai Ekspor tahun 2013 3. Nilai Impor tahun 2013 	
34.	Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah transmigran swakarsa tahun 2013 2. Jumlah seluruh transmigran tahun 2013 	

a.n. Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Plt. Sekretaris Daerah,



Wiryatmoko
NIP 195803121986101001

Lampiran V : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 16 TAHUN 2014
Tanggal 20 Februari 2014

BIODATA LIASON OFFICER (LO)
LPPD TAHUN 2013

Nama :

NIP/NRK :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

SKPD/UKPD :

No. Telp/Fax Kantor :

No. HP :

Alamat Kantor :

Alamat E-mail :

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiryatmoko
NIP 195803121986101001